

Peran Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Semarang

Ahmad Firdaus

Politeknik LP3I Makassar

dauz4646@gmail.com

Abstrak

Studi ini bermaksud menjelaskan dan menganalisis peran perempuan dalam kegiatan UMKM di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi peran apa saja yang harus dilakukan oleh perempuan dalam aktivitas ekonomi melalui pengembangan usaha UMKM. Selain menjelaskan dan menganalisis peran perempuan juga akan digali lebih mendalam resiko atau hambatan-hambatan yang muncul dari pengembangan ekonomi melalui sektor UMKM. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi dan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah perempuan pelaku UMKM di Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa perempuan berperan dalam pengembangan ekonomi melalui sektor UMKM dalam hal modal, produksi, distribusi, dan pemasaran. Perempuan menggunakan modal melalui koperasi, kerjasama, dan forum kelompok sosial. Mereka melakukan produksi sendiri berdasarkan pengalaman dan peluang usaha. Distribusi dan pemasaran dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Adapun hambatan untuk pengembangan usaha ekonomi dipengaruhi oleh : peran ganda dimana beban pekerja ibu rumah tangga diranah domestik serta dukungan dari keluarga yang kurang; pengembangan diri dan dukungan dari Pemerintah Daerah yang masih sangat minim.

Kata Kunci : Peran Perempuan, Pengembangan Ekonomi, UMKM.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM dibidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia. Usaha kecil dan menengah (UKM) sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Selain membantu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Harapannya, UMKM dapat menggunakan sumber daya nasional, termasuk tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Menurut Rahmana (2009), UMKM telah membuktikan diri sebagai pencipta lapangan kerja dan sebagai salah satu faktor penting dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam menghasilkan devisa Negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis. Peran UMKM dalam bidang sosial adalah dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peran usaha kecil bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan ekonomi rendah, tapi juga bagi konsumen di perkotaan yang memiliki daya beli lebih tinggi. Tambahan lagi, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk Pemerintah Lokal. Di samping itu, UMKM di Indonesia mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global. Tujuan sosial UMKM adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi agar mencapai tingkat kesejahteraan minimum.

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kabupaten Semarang mencapai 98,4 persen. Sementara itu UMKM mampu menyerap 79 persen dari total lapangan kerja. Dari jumlah itu industri pengolahan, perdagangan, serta perhotelan yang paling banyak menopang tenaga kerja. Usaha

skala kecil pada tahun 2017 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 153.044 orang, usaha skala mikro menyerap 182.106 orang, usaha skala menengah menyerap tenaga kerja sebanyak 183.396 dan usaha skala besar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 189.470 orang (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang, 2018). Jika dilihat dari kontribusi UMKM, Kabupaten Semarang merupakan Kabupaten dengan kontribusi UMKM terbesar, dengan itu diharapkan UMKM di Kabupaten Semarang dapat dijadikan salah satu alternatif masalah pengangguran. Peran industri di Kabupaten Semarang sangat penting dalam peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang (2018), sekitar 60% UKM dijalankan oleh perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara tanpa disadari. Peranan wanita dalam kegiatan ekonomi tidak hanya membantu memperkuat keuangan keluarga dan masyarakat tetapi juga dapat membantu mengurangi fluktuasi ekonomi, berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran perempuan di sektor UKM maupun UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan data tersebut semakin memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam membantu peningkatan kebutuhan keluarga menjadi hal yang penting.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan didasarkan beberapa penelitian yang penulis cantumkan, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan menjelaskan lebih lanjut mengenai peran perempuan dalam kegiatan ekonomi melalui sektor UMKM dari perspektif pengelolaan usaha yang mana belum dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Peran perempuan dalam kegiatan pengembangan ekonomi menyangkut 4 (empat) aspek yaitu modal, produksi, distribusi dan pemasaran. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis sejauh mana peranan perempuan dalam proses pengelolaan usaha

tersebut dilakukan. Dari temuan hasil nanti juga akan mengidentifikasi resiko dan hambatan yang muncul dalam kegiatan pengembangan ekonomi. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menambah referensi baru dalam melihat persoalan perempuan dikaitkan dan dikaji dari perspektif peran dan keterlibatan dalam kegiatan usaha ekonomi.

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan yang telah diuraikan sebelumnya maka dilakukan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Secara definisi studi kasus dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi. Studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang menginvestigasi fenomena kontemporer yang ada di dalam konteks kehidupan nyata, dimana batasan antara fenomena dan konteks yang nyata tersebut belum nyata terbukti dan untuk itu dibutuhkan pembuktian yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu kegiatan ekonomi perempuan melalui sektor UMKM. Dalam penelitian ini juga digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu In dept interview atau wawancara secara mendalam dan observasi.

C. Pembahasan

1. Peran Perempuan Dalam Kegiatan UMKM

Sektor UMKM yang paling banyak melibatkan perempuan dalam pelaksanaannya yaitu sektor perdagangan, kuliner, fashion dan industri kreatif. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang (2018) setidaknya ada sekitar 16.754 pelaku usaha perempuan yang terlibat dalam sektor tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat peran yang harus dilakukan perempuan dalam kegiatan ekonomi melalui sektor UMKM antara lain: peran dalam penyediaan modal usaha, proses produksi, distribusi dan pemasaran produk usaha.

Modal merupakan suatu masukan atau input yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses produksi. Modal tidak hanya berkaitan dengan uang atau finansial tetapi sarana prasarana juga merupakan modal fisik yang

mendukung kelancaran jalannya proses produksi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis setidaknya terdapat 3 langkah permodalan yang dapat ditempuh oleh perempuan dalam kegiatan pengembangan usaha ekonomi melalui UMKM di Kabupaten Semarang yaitu : pembiayaan melalui sektor perbankan dan non perbankan. Pembiayaan dengan melibatkan sektor bank yang dirasakan oleh para pelaku usaha di sektor UMKM masih sangat sulit dilakukan mengingat ketersediaan jaminan, prosedur administrasi serta bunga yang cukup tinggi. Kondisi ini yang tidak memungkinkan pelaku usaha UMKM mengingat jumlah produksi dan hasil yang masih sangat minim sehingga tidak sesuai. Pembiayaan di sektor non perbankan dilakukan melalui koperasi ditingkat Kecamatan melalui Unit Koperasi ketersediaan pembiayaan melalui koperasi ini sebenarnya merupakan hal yang sangat memungkinkan pelaku usaha perempuan untuk dapat memanfaatkannya tetapi mengingat persyaratan yang tidak mudah yaitu adanya istilah “tanggung renteng” menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mau mengambil resiko yang akan muncul. Tanggung renteng merupakan sistem permodalan kelompok dimana untuk mendapatkan modal usaha dilakukan dengan sistem kelompok yang minimal 1 kelompok terdiri dari 5 (lima) orang pelaku usaha dalam 1 wilayah. Sayangnya model pembiayaan seperti ini juga menjadi pertimbangan pelaku usaha.

Peran produksi atau pengelolaan usaha produksi yang dirasakan pelaku usaha merupakan modal pengelolaan yang masih bersifat tradisional dimana pelaku usaha masih mempergunakan alat dan tenaga produksi dalam lingkup kecil dan terbatas. Salah satu faktor yang mendasari yaitu masih sulitnya pelaku usaha untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi. Pada sektor usaha kuliner, pelaku usaha mendapatkan nilai tambah pengelolaan produk melalui permintaan pasar/konsumsi konsumen; pelatihan yang dilakukan oleh kelompok usaha produksi; pelatihan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Usaha Kecil Mikro dan Koperasi.

Peran distribusi dan pemasaran merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan produk hasil produksi. Peran perempuan pelaku usaha UMKM dalam kegiatan distribusi dan pemasaran dilakukan dengan

pemanfaatan kelompok sosial masyarakat seperti perkumpulan pelaku usaha; forum pertemuan kegiatan sosial kemasyarakatan; maupun kelompok sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan social media berupa Facebook, Instagram. Pemanfaatan kegiatan pemasaran melalui media digital lainnya masih terbatas mengingat kemampuan yang dimiliki pelaku usaha yang masih sangat minim.

2. Hambatan Dalam Pengembangan Kegiatan UMKM

Dalam pengembangan usaha ekonomi yang dilakukan oleh perempuan setidaknya terdapat 4 (empat) hambatan yang harus dihadapi oleh perempuan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yaitu: Peran perempuan seperti melahirkan dan menyusui merupakan kodrati alami perempuan dimana tidak dapat digantikan oleh aktor lainnya. Sedangkan peranan mengasuh, mendidik serta mengerjakan urusan rumah merupakan peran gender dimana dapat dilakukan tidak hanya oleh perempuan tetapi laki-lakipun dapat melaksanakannya. Kondisi ini sangat banyak dijumpai pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah yang mana kondisi tersebut diperparah dengan latar belakang pendidikan yang kurang. Dalam lingkungan sosial masyarakat peranan-peranan tersebut masih sulit untuk dilakukan dan hal tersebut juga terjadi dan dialami oleh hampir seluruh perempuan pekerja di sektor UMKM yang ada di Kabupaten Semarang. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, hampir 75% perempuan menjelaskan bahwa peranan domestik yang harus dilakukan mencakup hampir keseluruhan peranan, kondisi ini tentu secara tidak langsung berdampak pada pengembangan perempuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dimana kelelahan dan beban pikiran yang lebih sehingga tidak dapat fokus dalam pengembangan usaha.

Peranan wilayah publik merupakan suatu bentuk partisipasi yang mau tidak mau harus dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan tersebut terbentuk untuk menjalin komunikasi, interaksi, serta koordinasi yang baik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang

muncul dalam masyarakat. Peran publik yang harus dilakukan oleh perempuan dalam masyarakat merupakan suatu terceminan diri untuk dapat melakukan aktualisasi dan kontribusi sebagai bagian dari masyarakat dan budaya masyarakat. Kondisi inilah yang tanpa disadari juga menjadi kendala bagi perempuan untuk dapat mengembangkan dan memajukan kegiatan ekonomi. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Semarang cenderung memiliki budaya yang kuat dalam wujud solidaritas kemasyarakatan sehingga keterlibatan dan partisipasi aktif dari aktor di masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bagian dari kekuatan untuk terus menguatkan budaya yang ada. Terdapat konsekuensi-konsekuensi lanjutan apabila perempuan tidak terlibat dalam kelompok masyarakat sebagai wujud dari hukuman atas ketidakaktifan warga dalam kegiatan masyarakat.

3. Pengembangan diri

Sektor usaha UMKM merupakan sektor usaha dimana memerlukan aspek pelatihan berkaitan dengan produktivitas dan pemasaran. Optimalisasi pengembangan diri untuk memajukan usaha menjadi hal penting yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kondisi ini sulit untuk dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha perempuan karena tidak ada wadah yang menjadi dasar dilakukannya koordinasi. Koordinasi yang dilakukan tidak sampai kepada pelaku usaha dengan jenis usaha sama tetapi lebih kepada adanya kelompok-kelompok usaha yang secara umum tergabung dalam komunitas yang berbeda. Sebagai contoh ibu-ibu PKK yang ada di suatu Desa. Selain kegiatan PKK Desa yang harus dilakukan, para pelaku usaha perempuan juga memanfaatkan momentum kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk kegiatan untuk sharing pengalaman terhadap usaha. Tentu kegiatan ini tidak serta merta dapat dilakukan secara fokus sehingga hasilnya pun kurang dapat menunjukkan hasil yang optimal.

4. Dukungan Pemerintah

Pelaksanaan kegiatan disektor UMKM di beberapa Kecamatan di Kabupaten Semarang memiliki jumlah yang relatif cukup banyak. Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Semarang (2018) Jumlah usaha UMKM yang tersebar ke dalam beberapa jenis usaha. Dengan jumlah yang relatif cukup banyak, Dinas UMKM melakukan koordinasi di wilayah Kecamatan dengan

menempatkan aktor pendamping UMKM untuk memudahkan koordinasi yang dilakukan antara pihak Pemerintah dan masyarakat terkait izin usaha. Selain pendamping usaha di tingkat Kecamatan terdapat juga unit koperasi dimana dimaksudkan untuk memudahkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dari sisi ekonomi, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal dan menyalurkan produk usaha untuk dapat disosialisasikan kemasyarakat di Daerah lain. Sejauh ini keterlibatan Pemerintah melalui Dinas dan Kecamatan sudah berjalan dengan baik tetapi tidak semua aktor Pemerintah dapat melaksanakan tujuan tersebut dengan baik. Masih terdapat beberapa pelaku usaha diwilayah Kecamatan yang kesulitan dalam mendapatkan modal dan izin usaha serta sulit melakukan koordinasi terkait dengan kebutuhan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha perempuan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat memunculkan adanya peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu menyebabkan peran ganda yang harus dihadapi oleh kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Selain aspek peran domestik yang harus dijalani, peran publik yang menjadi tuntutan masyarakat juga mau tidak mau harus dipenuhi oleh banyak perempuan khususnya di Kabupaten Semarang. Penyebab berikutnya dari belum optimalnya kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh perempuan juga disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antar pekerja perempuan melalui forum/asosiasi pelaku usaha untuk masing-masing sektor usaha sehingga sulit untuk dapat mengembangkan usaha. Hambatan lain yang dialami oleh perempuan pekerja sektor UMKM di Kabupaten Semarang yaitu kurangnya fasilitasi dalam pengembangan pemasaran sehingga sulit untuk dapat memasarkan produk usaha.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi forum koordinasi antar pelaku usaha yang memiliki konsen yang sama sehingga akan memudahkan dalam sharing hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan dicarikan jalan penyelesaian dari hambatan yang dihadapi.
2. Adanya peningkatan pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk membantu pelaku usaha dalam pemasaran dan pengembangan nilai ekonomi usaha.
3. Adanya sosialisasi peran gender dalam keluarga sehingga memungkinkan kaum laki-laki untuk berpartisipasi dalam membantu kegiatan domestik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyawati, W (2017). Pengaruh usia produktif, tingkat pendidikan, dan motivasi pekerja wanita terhadap pendapatan keluarga. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. 2016
- Farida, L. (2013). Kontribusi pendapatan perempuan bekerja sektor informal pada ekonomi keluarga di Kota Pekanbaru. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 1(2), 103-112.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.,
- Islamy, M. I. (2009). *Principles of State Policy Formulation*.
- Mikro, S. U. (2014). *Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011*, Sekretariat Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Nurjannah, Nurjannah (2015) *Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan Terhadap Keluarga Dan Kegiatan Sosial Di Masyarakat (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Kulit Di Dusun Manding Sabdodadi Kabupaten Semarang)*. S1 thesis, Fakultas Ilmu Pendidikan.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. CIVIS, 1(2/Juli).

Nomor, U. U. R. I. (11). tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI.

Peet, R., & Hartwick, E. (2009). Theories of Development: Contentions, Arguments.

Rahmana, A. (2009). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan daya saing usaha kecil menengah.

Sukamto, A. (2014). Kontribusi Pekerja Perempuan Terhadap Pembentukan Pendapatan Keluarga. Jurnal ekonomi Terapan, 5(2).

Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting. LP3ES.

Wahyuningsih, S. (2009). Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. Mediagro, 5(1).

Zuhdi, S. (2019). Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri. Jurnal Jurisprudence, 8(2), 81-86.